



Yogyakarta Butuh Ruang Publik

YOGYAKARTA — Wali Kota Yogyakarta Herry Zudianto mengakui Kota Yogyakarta masih membutuhkan ruang publik. Karena itu, pemerintah berupaya membeli tanah di kampung-kampung. "Kami rutin membeli tanah di kampung. Jumlahnya sudah belasan lokasi," kata Herry kepada wartawan di University Center kemarin.

Tanah itu nantinya dialihfungsikan menjadi area bermain, olahraga, tempat arisan, atau kegiatan sosial lain. Kendalanya, kata Herry, tak semua warga bersedia menjual tanahnya. "Biasanya karena mereka belum memerlukan uang."

Berkaitan dengan hal itu, Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW)

Yogyakarta telah meneliti 14 kampung di Kota Yogyakarta, di antaranya Kotagede, Samirono, Ledok Code, Tukangan, Badran, Sidomulyo, dan Jetisharjo.

Hasilnya, perencanaan ruang publik cenderung diserahkan kepada pemilik modal, sehingga belum bisa dinikmati gratis. "Yang gratis cuma sedikit. Kalau mau diskusi, harus mengeluarkan uang di kafe," kata Imelda Damanik, Wakil Dekan III Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW.

Paulus Bawole, Dekan Fakultas Arsitektur dan Desain UKDW, mengatakan ruang publik di Yogyakarta belum sepenuhnya bisa dinikmati masyarakat, cenderung dikuasai pe-

milik modal. Berbeda dengan di luar negeri, utamanya Eropa, investor wajib mengikuti aturan pemerintah. "Ini tantangan pemerintah agar tak tunduk kepada investor," katanya.

Menurut Paulus, aturan di Indonesia sudah bagus, tapi implementasinya kurang. Minimnya jumlah ruang publik membuat masyarakat di perkampungan berinisiatif menciptakan ruang publik sendiri. "Ruang publik di perkampungan ini kearifan lokal yang patut dipertahankan," dia menambahkan.

Sementara itu, di Semarang, pemerintah diminta menambah lokasi *car-free day*. Direktur Perdikan Fatah Muria mengatakan *car-free day*

bukan hanya bagian dari upaya kesehatan lingkungan atau *go green*, tapi juga upaya menciptakan ruang publik baru, sebagai tempat berinteraksi warga Kota Semarang. "Sebaiknya jumlah lokasinya ditambah," katanya.

Saat ini, Fatah melanjutkan, jumlah ruang publik di Kota Semarang semakin berkurang, sedangkan jumlah penduduknya bertambah. "Masyarakat jangan dipaksa berkumpul di mal saja," tuturnya. Karena itu, lokasi *car-free day* di sepanjang Jalan Pemuda, yang dibuka Pemerintah Kota Semarang setiap Minggu pukul 06.00-09.00, sejak sebulan lalu selalu penuh sesak. ● BERNADA RURI | SOHRIN

Dihaturkan Kepada Yth. :

1. Walikota Yogyakarta
2. Wakil Walikota Yogyakarta

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Positif	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 13 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005